

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka uji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (legislative review) dalam rangka memperkuat fungsi di bidang legislasi = The authority of the House of Representatives in the context test the constitutionality of the law against Law 1945 (legislative review) in order to strengthen function in the field of legislation /  
Muhamad Kurnia

Muhamad Kurnia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348910&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan (Constitutional Review) dapat diuji melalui mekanisme uji materil di Mahkamah Konstitusi (judicial review), di Dewan Perwakilan Rakyat (legislative review), dan oleh Eksekutif (executive review). Untuk uji materil undang-undang dapat melalui 2 (dua) mekanisme yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi dan legislative review di DPR meskipun hasilnya berbeda. Apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan norma sedangkan DPR menggantikan norma. Akhir-akhir ini ada warga negara apabila ingin mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi disarankan untuk ke DPR karena bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Legislative review yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui undang-undang. Bagi lembaga yang menjalankan fungsi legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden serta DPD (untuk Undang-undang tertentu) untuk menjadi masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat fungsi legislasi. Untuk itu kedudukan legislative review oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan mekanisme uji konstitusionalitas undang-undang untuk menerima uji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh masyarakat. Checks and balances dalam pembentukan undangundang sangat penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugas wakil rakyat dan peran DPR dalam pembentukan undang-undang merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat yang memilih.

<hr>

**ABSTRACT**

Review the Constitutionality of Legislation (Constitutional Review) can be tested through a mechanism of judicial review in the Constitutional Court (judicial review), in the House of Representatives (legislative), and by the Executive (executive review). For judicial legislation can in 2 (two) through the mechanism of judicial review in the Constitutional Court and legislative review in the House

of Representatives although the results are different. If the Constitutional Court annulled the norm while the House replace the norm. Lately there if citizens want to file a judicial review to the Constitutional Court suggested to the House because it was not authorized to Konstitusi.Legislative Court review done in the capacity of institutions that make and review and approve legislation. For those institutions that perform the function of legislation in this House of Representatives (DPR) and the president and DPD (for specific legislation) to be a useful input to improve performance and strengthen the legislative function. For the position of legislative review by the House of Representatives (DPR) is a testing mechanism constitutionality of laws to accept constitutionality of laws against the Constitution proposed by the community. Checks and balances in the legislation are very important as part of the implementation of the tasks and role of the people's representatives in Parliament is law making as a form of accountability to constituents or the people who choose.